



Implementasi Kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai

Anies Handayani, Email : anieshandayani2101@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat kendala yaitu fasilitas pendukung seperti komputer/laptop dan akses internet yang kurang memadai. Saran yang dapat diberikan penulis sebagai tindak lanjut dalam penelitian adalah : 1) Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai agar lebih meningkatkan Sosialisasi dan pendampingan serta perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang ada disekolah. 2) Bagi Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala dan Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Banggai agar melaksanakan Kebijakan Perencanaan Berbasis Data sesuai dengan tujuan dan target dalam Rapor Pendidikan sekolah masing – masing, serta dalam pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data (PBD) tidak sekedar mencapai tujuan kuantitas tetapi lebih utama peningkatan kualitas dan mutu.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perencanaan Berbasis Data

ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of Data-Based Planning (PBD) Policy in Elementary Schools in Lamala District, Banggai Regency. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Data-Based Planning (PBD) policy in Elementary Schools in Lamala District, Banggai Regency has been running well in accordance with applicable provisions, although there are still obstacles, namely supporting facilities such as computers/laptops and inadequate internet access. Suggestions that can be given by the author as a follow-up to the study are: 1) For the Education and Culture Office of Banggai Regency to further improve Socialization and mentoring as well as repair and procurement of supporting facilities and infrastructure in schools. 2) For Elementary Schools in Lamala District and Elementary Schools in Banggai Regency to implement the Data-Based Planning Policy in accordance with the objectives and targets in their respective school Education Reports, and in the implementation of Data-Based Planning (PBD) not only achieve quantitative objectives but more importantly improve quality and quality.

Keywords: Implementation, Policy, Data Driven Planning

PENDAHULUAN

Untuk mendorong pendidikan lebih maju lagi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerapkan kebijakan tentang Program Perencanaan Berbasis Data (PBD) menggunakan Platform Rapor Pendidikan yang merupakan Episode 19 (MD 19) dari Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret. Pada masa global seperti dikala ini, pembelajaran yang bermutu ialah sesuatu keharusan. Globalisasi diisyaratkan oleh adanya mega kompetisi dalam seluruh aspek kehidupan yang semakin terasa tidak mudah untuk bisa dihindari. Kosekuensinya, lembaga pendidikan di Indonesia di tuntut untuk menciptakan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi (Mahendra et al., 2021). Perencanaan merupakan kegiatan utama dalam proses kegiatan yang sangat esensial. Perencanaan sebagai proses awal kegiatan atau aktivitas dalam manajemen memiliki pengaruh yang besar dalam implementasi suatu kegiatan (Bailey & Michaels, 2019). Perencanaan yang baik, optimal dan detail akan memudahkan pengambil keputusan atau tim pelaksana dalam proses implementasi suatu kegiatan (Bryson, 2004). Oleh karena itu perencanaan tidak bisa dianggap remeh atau hanya sebatas formalitas belaka yang tidak diperhatikan saat pelaksanaan kegiatan. Perencanaan yang baik akan menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan lebih besar (Prasetyono et al., 2021). Selain itu, Perencanaan Berbasis Data (PBD) juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan dan kondisi lapangan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menjadikan perencanaan tidak sebatas pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah lampau. Perencanaan saat ini harus mengadopsi teknologi terkini yang berfungsi dalam mempermudah proses perencanaan dan implementasi kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi (Pynes, 2009). Selanjutnya, data merupakan sekumpulan informasi, fakta dan cerita kejadian dari suatu fenomena yang telah teruji kebenaran dan keabsahannya (Abdurahman, 2018). Data dapat dihimpun dari hasil pengamatan observasi langsung maupun pengambilan secara sekunder yang melibatkan pihak lain dalam proses pengumpulan datanya (Hidayatulloh et al., 2020).

Dasar Hukum Perencanaan Berbasis Data (PBD) ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 09 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan. Untuk itu maka seluruh Satuan Pendidikan harus sudah melihat rapor pendidikannya masing – masing melalui Platform Rapor Pendidikan. Tidak boleh ada lagi satuan Pendidikan yang belum melihat Rapor Pendidikannya, karena berawal dari situlah setiap satuan Pendidikan menentukan langkahnya dalam pembuatan program dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolahnya (RKAS). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan

Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Akademik adalah sebagai bahan kajian ilmiah tentang Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai dan sebagai sumber data bagi peneliti berikutnya khususnya tentang Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Sedangkan manfaat praktis adalah sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai dan sebagai bahan evaluasi dan kajian bagi semua stakeholders yang ada di sekolah terhadap kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dalam mengefektifkan pengelolaan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar se-kecamatan Lamala, yang berjumlah 10 (sepuluh) sekolah. Berikut merupakan daftar sekolah dan lokasinya.

Tabel 1
Daftar Sekolah Dasar Kecamatan Lamala

No.	Sekolah	Lokasi
1.	SD Inpres Pembina Bonebobakal	Desa Bonebobakal
2.	SD Inpres Lomba	Desa Lomba
3.	SD Negeri Poroan	Desa Poroan
4.	SD Inpres Sirom	Desa Sirom
5.	SD Negeri Kagitakan	Desa Kagitakan
6.	SD Negeri Molino	Desa Nipa
7.	SD Inpres Bahari Makmur	Desa Bahari Makmur
8.	SD Negeri Lukpalampang	Desa Kota Baru
9.	SD Inpres Kota Baru	Desa Baruga
10.	SD Inpres Labotan	Desa Labotan

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah dan bendahara serta salah satu guru pada masing – masing sekolah. Kepala Sekolah dan bendahara sekolah sebagai subyek penelitian merupakan pihak yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan keuangan dana BOS, dengan tujuan agar subjek dapat memberikan data secara tepat terkait Perencanaan Berbasis Data sekolah masing – masing. Guru sebagai subjek penelitian lain merupakan data pendukung.

Obyek dalam penelitian ini yakni pelaksanaan kegiatan program Perencanaan Berbasis Data (PBD) di sepuluh Sekolah Dasar se-kecamatan Lamala dalam pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang – orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti. Berikut adalah daftar informan yang akan dimintai informasi oleh peneliti :

Tabel 2
Daftar Informan Penelitian

No.	Informan Peneliti	Pekerjaan	Alamat
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, atau Staf Bidang Pembinaan SD Disdikbud (Admin MARKAS)	PNS	Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk
2.	Kepala SD Inpres Pembina Bonebobakal atau Bendahara SD Inpres Pembina Bonebobakal	PNS	Desa Bonebobakal Kecamatan Lamala
3.	Kepala SD Inpres Lomba atau Bendahara SD Inpres Lomba	PNS	Desa Lomba Kecamatan Lamala
4.	Kepala SD Negeri Poroan atau Bendahara SD Negeri Poroan	PNS	Desa Poroan Kecamatan Lamala
5.	Kepala SD Inpres Sirom atau Bendahara SD Inpres Sirom	PNS	Desa Sirom Kecamatan Lamala
6.	Kepala SD Negeri Kagitakan atau Bendahara SD Negeri Kagitakan	PNS	Desa Kagitakan Kecamatan Lamala
7.	Kepala SD Negeri Molino atau Bendahara SD Negeri Molino	PNS	Desa Nipa Kecamatan Lamala
8.	Kepala SD Inpres Bahari Makmur atau Bendahara SD Inpres Bahari Makmur	PNS	Desa Bahari Makmur Kecamatan Lamala
9.	Kepala SD Negeri Lukpalampang atau Bendahara SD Negeri Lukpalampang	PNS	Desa Kota Baru Kecamatan Lamala
10.	Kepala SD Inpres Kota Baru atau Bendahara SD Inpres Kota Baru	PNS	Desa Baruga Kecamatan Lamala
11.	Kepala SD Inpres Labotan atau Bendahara SD Inpres Labotan	PNS	Desa Labotan Kecamatan Lamala

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari responden mengenai topik penelitian sebagai data primer (Sugiyono, 2017: 225).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini dapat ditemukan dengan cepat (Sugiyono, 2017 : 225).

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi pelaksana serta pendukung lain dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala.

2. Wawancara

Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur (semistruktur interview). Menurut Sugiyono (2018: 467) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana Responden yaitu Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala.

3. Studi Literatur atau Dokumentasi

Metode ini untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif seperti profil sekolah, struktur organisasi, visi-misi dan tujuan sekolah, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana. Dengan metode dokumentasi ini juga peneliti ingin mendapatkan data yang berupa, dokumen RKAS sekolah, serta perihal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Uji Kredibilitas merupakan pengujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Uji kredibilitas dilakukan dengan beberapa pilihan cara diantaranya perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan pembimbing atau teman, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji kredibilitas dengan cara sebagai berikut:

1. Peningkatan ketekunan, peningkatan ketekunan berkaitan dengan pengecekan kembali terhadap data yang sudah dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan agar pengamatan yang dilakukan lebih cermat dan berkesinambungan. Selain itu, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diteliti. Peneliti perlu meningkatkan ketekunan agar wawasan semakin luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang ditemukan. Cara yang dilakukan adalah dengan membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

2. Triangulasi Wiersma (Sugiyono, 2012:372) menjelaskan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Oleh karena itu, triangulasi terdiri dari triangulasi sumber data, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber data dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Perolehan data dideskripsikan dan dikategorisasikan menjadi lebih spesifik. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dimaksudkan untuk menguji kredibilitas data dengan cara pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda.
3. Diskusi dengan pembimbing atau teman Diskusi dengan pembimbing atau teman dilakukan agar pada hasil penelitian yang masih sementara, jika ditemukan kekurangan data dapat segera ditambahkan dengan data yang lebih lengkap sehingga hasil penelitian lebih kredibel.
4. Menggunakan bahan referensi, penggunaan bahan referensi sebagai salah satu uji kredibilitas penelitian dimaksudkan sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

Data yang telah dikumpulkan peneliti kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil analisis tersebut selanjutnya disusun laporan hasil penelitian tentang analisis mendalam Implementasi Kebijakan tentang Perencanaan Berbasis Data (PBD) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.

Adapun tahapan analisis data pada penelitian kualitatif meliputi sebagai berikut:

1. Reduksi data ialah data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum dipilih hal pokoknya, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data selanjutnya membuat ringkasan mengkode menelusuri tema membuat tugas dan menulis catatan - catatan kecil.
2. Penyajian data yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.
3. Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses. Penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang diluangkan dalam kesimpulan tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya dan melalui proses verifikasi terus-menerus maka akan diperoleh kesimpulan dari berbagai data.

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konsep dari masing – masing variabel sebagai berikut:

- a. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan menggunakan tindakan – tindakan yang nyata serta sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan.

- b. **Perencanaan Berbasis Data (PBD)**
Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah suatu rangkaian langkah yang berhubungan dengan perencanaan suatu kegiatan dalam rangka untuk membenahi atau meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing – masing satuan pendidikan. Perencanaan Berbasis Data (PBD) dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
- c. **Efektivitas Pengelolaan Dana Bos**
Efektivitas Pengelolaan dana BOS dikatakan sangat efektif bila mencapai kriteria diatas 70%. Indikator perencanaan dengan besar persentase 91% berada pada kategori sangat efektif, dengan Perencanaan pengelolaan dana BOS yang efektif tentu akan menghasilkan realisasi yang baik.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Organisasi (*organization*)

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Organisasi merupakan perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan dipimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan apa yang dijelaskan di atas, maka peneliti menurut Jones (dalam Widodo 2010), pengorganisasian dalam implementasi publik yaitu : kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjadikan program berjalan. Dengan demikian ketiga aspek ini akan dibahas sebagai berikut:

a) Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf dengan ukuran cukup dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, otoritas, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya Sumber Daya Manusia, terbatasnya dana atau fasilitas dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi dan membentuk sepakat untuk mencapai tujuan tertentu. Maka melalui sumber daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya fungsi, dimana terdapat pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana.

Dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah proses yang dinamis dan merupakan fungsi manajer, sementara yang disebut organisasi hanyalah wadah atau tempat manajer untuk melakukan kegiatan dalam rangka menuju tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari informan melalui hasil wawancara bahwa ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan aspek organisasi dalam upaya pelaksanaan implementasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai yaitu kelembagaan, sumber daya

manusia, petunjuk teknis dan sarana prasarana yang cenderung menunjukan keterkaitan yang berkontribusi secara maksimal dalam upaya implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai, keadaan ini disebabkan oleh karena sudah terpenuhinya dukungan dari aspek organisasi sebagai salah satu indikator dalam model Perencanaan Berbasis Data (PBD).

b) Struktur Organisasi

Organisasi birokrasi adalah unit-unit organisasi dimana unit-unit organisasi merupakan bagian dari model besar yakni struktur. Struktur adalah mekanisme-mekanisme formal dengan bagaimana organisasi dikelola, Handoko (1998:169) mengatakan bahwa: “dalam struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi”. Struktur bertujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan diantara anggota-anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukannya dapat berjalan dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penataan struktur/unit perlu diatur melalui aturan jelas yang membatasi agar wewenang fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, tidak dilewati oleh birokrasi. Adanya keteraturan yang jelas akan dapat menghilangkan tugas-tugas pegawai yang *overlapping* (tumpang tindih), demikian juga peraturan yang jelas akan dapat menciptakan prosedur kerja yang baku.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari informan melalui hasil wawancara di atas, beberapa hal yang ada kaitannya dengan aspek struktur organisasi dalam upaya pelaksanaan implementasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai yaitu tugas dan tanggung jawab pelaksana yang telah berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta koordinasi antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai yang telah berjalan dengan baik dalam upaya pelaksanaan implementasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai, keadaan ini disebabkan oleh karena sudah terpenuhinya dukungan dari aspek struktur organisasi sebagai salah satu indikator dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD).

c) Metode

Menurut Agus M. Hardjana. (2003) Metode merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah, metode tidak kalah penting perannya didalam pencapaian tujuan. Dengan adanya metode dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut akan lebih mudah dan teratur dalam mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah atau bendahara sekolah SD di Kecamatan Lamala serta Admin Markas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai menjelaskan bahwa, Sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai serta melakukan pendampingan

dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD). Hal ini menunjukkan bahwa, proses sosialisasi dan pendampingan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai sudah berjalan dengan baik, sehingga berimplikasi pada proses implementasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai sudah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dari penjelasan di atas menggambarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai sudah cukup baik. Sementara hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai menjelaskan bahwa bentuk pendampingan yang dilaksanakan diantaranya dengan melakukan rekonsiliasi. Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti mendeskripsikan bahwa suatu organisasi bukan hanya merupakan kelembagaan yang menjabarkan struktur organisasi, namun terdapat suatu sumber daya yang cukup, prasarana dan prasarana yang memadai serta metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

1. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya seorang administrator untuk mengerti dan memahami maksud dari pembuat kebijakan terutama mengetahui dengan baik apa dan bagaimana tujuan akhir yang harus direalisasikan serta terwujud, tentu hal ini agar tidak terjadi kebingungan dengan apa yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

a) Kejelasan isi kebijakan.

Semakin rinci dan jelas isi kebijakan, maka akan mudah diimplementasikan karena implementator mudah memahami dan menginterpretasikan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

Maka dengan demikian, adanya tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau substansi kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 merupakan regulasi yang membahas tentang pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan Raport pendidikan. Hal ini merupakan inti dari kegiatan yang telah dibuat melalui sosialisasi, yang mana pihak-pihak yang telah terlibat dapat mengetahui dan memahami suatu kebijakan tersebut.

b) Aturan keputusan dari organisasi pelaksana.

Berbicara mengenai aturan yang menyangkut keputusan dari organisasi pelaksana maka dibutuhkan adanya pengetahuan dan pemahaman, sehingga pihak-pihak tersebut dapat memahami kedudukan dan perannya masing-masing yang diharapkan dapat secara optimal terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan model kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD).

Berdasarkan dari hasil wawancara maka peneliti dapat mendeskripsikan bahwa aturan ataupun ketentuan yang termuat dalam SOP pada pelaksanaan perencanaan berbasis data, yang mana implementasinya dapat dilihat dengan adanya respons yang baik dan keterlibatan secara aktif dari berbagai pihak yang terkait dalam tahap implementasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD). maka berbagai pihak tersebut akan memiliki sikap dan tindakan berupa kesadaran

dan rasa tanggungjawab untuk menyukseskan implementasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang telah dibuat sesuai dengan perannya masing-masing.

2. Aplikasi (penerapan)

Aspek aplikasi kebijakan publik ini merupakan upaya yang menekankan *the establishment of policy goals*, agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien (*to be effectively and efficiently*) dalam implementasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Maka kemudian dari aspek aplikasi ini, ditinjau dari dua sub variabel yang terkait pada aspek aplikasi yaitu a) kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, b) kinerja dan dampak.

a) Kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Dalam melaksanakan kebijakan, pelaksana dituntut untuk memiliki sikap yang mewujudkan pada tindakan patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan publik. Sehingga, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pelaksana terhadap isi kebijakan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan pada ketentuan yang berlaku merupakan upaya dalam melaksanakan kebijakan, sebagai salah satu wujud dari model implementasi kebijakan perencanaan berbasis data melalui tahapan pelaksanaannya.

b) Kinerja dan dampak

Setelah pelaksana kebijakan patuh terhadap isi kebijakan dan rutinitas kerja dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan maka akan bermuara pada kinerja yang baik. Implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang memuaskan semua pihak penerima kebijakan atau program, meskipun terkadang terdapat kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di sekolah.

Efektivitas Pengelolaan dana BOS dikatakan sangat efektif bila mencapai kriteria pada indikator perencanaan dengan Perencanaan pengelolaan dana BOS yang efektif tentu akan menghasilkan realisasi yang baik. Dana BOS mengalokasikan penggunaan dana untuk pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah, sekolah – sekolah penerima dana BOS di bantu untuk pembelian dan perbaikan fasilitas sarana prasarana untuk mencapai Standar Minimum Pelayanan (SPM) melalui pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan peralatan sekolah, dan pendayagunaan laboratorium dan bahan praktek.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat kendala – kendala yakni fasilitas pendukung seperti komputer/laptop/cromebook dan akses internet yang kurang memadai.

SARAN

1. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dengan adanya penelitian ini agar lebih meningkatkan Sosialisasi dan pendampingan serta perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang ada disekolah.
2. Bagi Sekolah – sekolah SD di Kecamatan Lamala khususnya, serta umumnya sekolah – sekolah SD yang ada di Kabupaten Banggai agar melaksanakan Kebijakan Perencanaan Berbasis Data sesuai dengan tujuan dan target yang ada dalam Rapor Pendidikan sekolah masing – masing, serta dalam pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data (PBD) tidak sekedar mencapai tujuan kuantitas tetapi lebih utama peningkatan kualitas dan mutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, M. (2018). Sistem Informasi Data Pegawai Berbasis Web Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO -Ilmu Komputer & Informatika*, 1(2), 70–78. <https://doi.org/10.47324/ilkominfo.vi12.10>.
- Bailey, M. D., & Michaels, D. 2019. An optimization-based DSS for student-toteacher assignment: Classroom heterogeneity and teacher performance measures. *Decision Support Systems*, 119(January), 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2019.02.006>.
- Bryson, J. M. 2004. Strategic planning and decision-making for public and non-profit organizations. In Jossey-Bass. <https://doi.org/10.4324/9781315640686>.
- Hidayatulloh, K., MZ, M. K., dan Sutanti, A. 2020. Perancangan Aplikasi Pengolahan Data Dana Sehat Pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer*, 1(1), 18–22.
- Mahendra, Y.I., S. Mus,, dan Wahira. 2023. Perencanaan Berbasis Data Pada Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di UPT SMPN 9 Binamu Kabupaten Jeneponto. *Pinisi Journal Of Health & Sport Science*. 1-11.
- Pynes, J. E. 2009. *Human Resources Management Fo Public and Non Profit Organizations*. San Francisco: Jossey_Bass.
- Prasetyono, H., A. Nurfarkhana., I. P. Ramdayana., A. Abdillah., dan I. Asikin. 2021. Pelatihan Perencanaan Berbasis Data dan Pengelolaan Sumberdaya Sekolah. *Jurnal PKM: Pengabdian kepada Masyarakat*. 5(06): 607-617.